



## Pengaruh *Women's March* Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia Dan Amerika Serikat

Catur Wisnu Anggoro<sup>1</sup>, Maulana Rifai<sup>2</sup>, Prilla Marsingga<sup>3</sup>

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Singaperbangsa Karawang

|                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              | <b>Abstrak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Received:          | 20 Juni 2025 | <i>This research compares the impact of the Women's March in the United States and Indonesia on public policy in the political dimension. A qualitative approach is used to analyze its success in influencing policy. The Women's March was born as a response to issues of discrimination and gender inequality. In the US it focuses on the Trump administration, while in Indonesia it raises the issue of gender inequality and violence against women. The research method involved a review of literature in both countries. In the US, the Women's March had a major impact in increasing women's public awareness and political participation. In Indonesia, he played a role in ratifying the Migrant Worker Protection Law and the Sexual Violence Elimination Bill. Influencing policy changes and increasing public awareness of women's issues is proof of its success</i> |
| Revised:           | 27 Juni 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Accepted:          | 01 Juli 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kata Kunci:</b> |              | <i>Women's March, Women, Gender Equality</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(\*) Corresponding Author: [2010631260024@student.unsika.ac.id](mailto:2010631260024@student.unsika.ac.id)

**How to Cite:** Anggoro, C., Rifai, M., & Marsingga, P. (2025). Pengaruh *Women's March* Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.A), 50-56. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12155>

### PENDAHULUAN

Manusia berperan ganda sebagai objek dan subjek pembangunan, diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun terjadi perkembangan, ketidaksetaraan gender tetap menjadi isu, terutama dalam mencapai manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan ini tercermin dalam aspek-aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Meski telah ada kemajuan, kesetaraan gender masih terkendala oleh tingkat diskriminasi yang beragam. Pada umumnya, perempuan masih menghadapi posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Ideologi gender yang mempertimbangkan perbedaan biologis atau fisiologis antara keduanya berperan dalam menentukan peran masing-masing. Konstruksi sosial budaya dalam masyarakat terkadang menetapkan bahwa rumah tangga adalah domain perempuan atau hanya ranah domestik, sementara ranah publik adalah tempat bagi laki-laki (Irvan et al., 2021).

Dikotomi peran semacam itu dapat memunculkan budaya patriarki, yang menjadi salah satu faktor penyebab perlakuan yang merugikan bagi perempuan, seperti subordinasi, marjinalisasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, banyak orang, terutama para pemerhati perempuan, merasa perlu untuk memperbaiki kondisi ketidakadilan terhadap perempuan, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Ketidakpuasan terhadap posisi perempuan seperti itu memicu gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perempuan, baik di Barat maupun di Indonesia. Perjuangan kaum feminis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender semakin intensif setelah ditetapkannya Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948. Gerakan ini juga melibatkan perjuangan di dunia internasional, termasuk di Indonesia.

Upaya mencapai kesetaraan gender sering kali muncul sebagai tanggapan terhadap keprihatinan mengenai perlakuan yang berbeda berdasarkan gender. Respons terhadap perbedaan tersebut dapat beragam, mulai dari protes jalanan (demonstrasi), advokasi, hingga pembentukan kelompok tekanan yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Gerakan-gerakan ini memiliki ciri khas yang beragam dan tersebar di seluruh dunia, mencakup dimensi lokal, nasional, regional, dan transnasional. Salah satu gerakan yang menyediakan platform bagi para pejuang kesetaraan gender untuk menentang diskriminasi sebagai respons terhadap kebijakan dan sikap kepemimpinan adalah Women March (WM). Gerakan ini awalnya muncul di Amerika Serikat pada tahun 2017 sebagai demonstrasi dan protes yang dipimpin oleh para pejuang gender di Washington D.C. pada Januari 2017 sebagai reaksi terhadap kepemimpinan Donald Trump. Pembelaan terhadap nilai-nilai dan ideologi yang sama cepat dan massif menyebar ke wilayah lain di Amerika seperti New York, Chicago, dan sebagainya, bahkan secara transnasional meluas ke berbagai benua, melintasi batas negara, termasuk Indonesia (Ismail, 2020). Terdapat perbedaan yang signifikan antara Gerakan Women March yang ada di Amerika Serikat dengan di Indonesia yang mana nantinya akan dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu muncul pertanyaan terkait gerakan ini seperti bagaimana pengaruh gerakan Women's March terhadap perubahan kebijakan publik di AS dan Indonesia? yang nantinya akan terjawab dalam penulisan ilmiah ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan menganalisis informasi terkait keberhasilan Women's March (WM) di Indonesia dan Amerika Serikat dengan fokus pada dimensi politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan dinamika gerakan tersebut dalam kerangka politik yang berbeda. Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui tinjauan literatur yang mendalam terkait Women's March di kedua negara, termasuk dokumentasi resmi, artikel akademis, laporan media, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang relevan dengan isu-isu politik yang diangkat oleh WM. Analisis kualitatif akan difokuskan pada perbandingan keberhasilan WM dalam merespon dan memengaruhi kebijakan politik di tingkat nasional.

### **DEFINISI WOMEN'S MARCH**

Menurut Jamieson (dalam Meivio Bahari et al., 2022) pada awalnya, Women's March adalah suatu gerakan yang berupaya mengungkap dan menghapuskan diskriminasi yang telah lama ditujukan kepada perempuan. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk memperbaiki pemahaman yang salah terhadap standar yang diterapkan oleh masyarakat terhadap perempuan, yang sering kali menghambat kemampuan perempuan untuk mengaktualisasikan diri dan bahkan dalam beberapa situasi, menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah.

Women's March adalah suatu gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia perempuan, yang terancam karena adanya ketidaksetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, seperti kekerasan terhadap wanita, perlakuan minoritas baik pria maupun perempuan di berbagai negara, dan hak asasi manusia lainnya. Pembentukan gerakan ini dipicu oleh kebutuhan untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. (Rifqi, 2018). Adapun definisi lain dari gerakan ini yaitu bahwa Women's March (WM) adalah kelompok atau organisasi aktivis yang berkomitmen untuk memperjuangkan dan mengadvokasi kepentingan dengan tujuan memengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka berupaya membawa isu-isu terkait hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, menjadi sorotan utama (Ismail, 2020).

### **SEJARAH WOMEN'S MARCH DI AMERIKA SERIKAT**

Women's March (WM) pertama kali diadakan pada 21 Januari 2017 di Washington DC, Amerika Serikat, dan kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Gerakan ini diprakarsai oleh Teresa Shook dan dimulai sebagai protes terhadap kemenangan Donald Trump. Women's March bukan hanya menjadi wadah aksi protes, tetapi juga menjadi kelompok kepentingan dalam oposisi, terutama dari Partai Demokrat AS, dengan membawa isu hak asasi manusia dan hak perempuan. Di Amerika Serikat, WM memengaruhi retorika dan dinamika politik, membawa isu kesetaraan gender, ras, akses kesehatan, dan perlindungan terhadap imigran. Keberadaannya berpengaruh besar terhadap kebijakan publik dan mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk Planned Parenthood Federation of America dan Serikat Pekerja Layanan Internasional.

Pada awalnya, Women's March (WM) adalah sebuah aksi protes terhadap pemerintahan Trump dan ancaman yang dianggapnya terhadap reproduksi, hak sipil, dan hak asasi manusia. Massa yang mencapai ratusan ribu orang berkumpul di ibu kota AS, Washington, sebagai bentuk protes terhadap kampanye yang diusung Trump, terutama isu-isu yang mengenai hak perempuan. Estimasi menyebutkan bahwa sekitar 3,6 hingga 4,6 juta orang turut serta dalam protes di AS, dan total mencapai 5 juta orang di seluruh dunia.

Protes terjadi setelah beberapa jam pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Aksi protes tersebut melibatkan beragam kelompok masyarakat, termasuk warga sipil, akademisi, mahasiswa, dan selebriti. Mereka bersatu dalam gelombang massa dengan tujuan utama menyampaikan pesan kepada Donald Trump bahwa perempuan juga memiliki hak-hak yang seharusnya diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Isu yang ditekankan dalam aksi tersebut mencakup hak-hak perempuan, termasuk kesetaraan gender dan ras, aksesibilitas layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap imigran, dan berbagai isu lainnya (Al Ayubi & Zahidi, 2022).

### **SEJARAH WOMEN'S MARCH DI INDONESIA**

Women's March (WM) merupakan respons relatif terhadap eksistensi, sikap, dan perilaku kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump, sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, telah menjadi sorotan utama karena kontroversi terkait rasisme dan pelecehan seksual. Meskipun Presiden tersebut telah menjadi pusat perhatian atas berbagai isu, reaksi dan protes lainnya tidak mencapai sebesar gerakan WM. WM berkembang menjadi gerakan bersama kaum perempuan hampir di seluruh dunia, membedakannya dari reaksi-reaksi protes dan demonstrasi lainnya yang muncul sebagai respons terhadap Trump dan dimulai di Washington DC. Setiap tanggal 8 Maret, negara-negara di seluruh dunia merayakan Hari Perempuan Internasional (International Women's Day). Di Indonesia, Women's March (WM) pertama kali digagas oleh Jakarta Feminist Discussion Group pada 4 Maret 2017, melibatkan sekitar 700 peserta. Alasan diadakannya WM di Indonesia terkait dengan isu-isu seperti ketidakadilan gender, kesetaraan gender, pelecehan seksual, kekerasan gender, dan ketidakpuasan hak-hak perempuan. Data tahun 2019 menunjukkan kasus kekerasan dan pelecehan fisik serta seksual terhadap perempuan di Indonesia. Menurut laporan Komisi Nasional Perempuan tahun 2021, terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 299.911 kasus, dengan penanganan oleh berbagai lembaga, termasuk pengadilan dan mitra layanan Komnas Perempuan (Meivio Bahari et al., 2022). Tujuan utama Women's March (WM) di Indonesia adalah sebagai aksi kampanye untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh, pada bulan November 2017, WM mengorganisir berbagai kegiatan kampanye selama 16 hari Anti Kekerasan hadap Perempuan di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk menghadapi penyebaran dan peningkatan frekuensi kekerasan yang terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan WM di Indonesia menjadi salah satu upaya untuk menanggapi dan mengatasi permasalahan tersebut. Perkembangan pengaruh dari protes Women's March

(WM) di Indonesia berperan sebagai kelompok kepentingan yang memanfaatkan platform suara publik untuk menekan pemerintah agar segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Tindakan ini kemudian diikuti dengan menyuarkan delapan tuntutan lainnya pada aksi yang berlangsung pada tahun 2018.

### **PERBANDINGAN PENGARUH *WOMEN'S MARCH* TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK AMERIKA DAN INDONESIA**

Melalui gerakan Women's March di Amerika Serikat, tujuan utamanya adalah memberdayakan perempuan dengan mendorong tuntutan untuk mencapai kesetaraan hak dengan laki-laki. Gerakan ini memiliki dampak positif dalam menyuarkan dan memberikan pemahaman kepada perempuan tentang cara melawan praktik kekerasan, serta bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat agar perempuan tidak lagi dianggap sebagai objek. Pentingnya gerakan Women's March terutama terletak pada peningkatan kesadaran kognitif masyarakat terhadap isu-isu perempuan, dengan fokus pada penghapusan diskriminasi dan pengurangan marginalisasi terhadap hak-hak perempuan. Dengan demikian, Women's March tidak hanya menjadi sebuah protes fisik tetapi juga merupakan wadah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan. Gerakan ini membantu membentuk pandangan baru dan lebih inklusif terhadap peran serta hak perempuan dalam masyarakat, menciptakan atmosfer yang mendukung kesetaraan gender dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan.

Gerakan Women's March di Amerika Serikat memiliki dampak yang merambat hingga ke 30 negara lainnya, termasuk dukungan dan perjuangan untuk hak-hak perempuan di negara-negara bagian seperti Kanada. Selain itu, beberapa politisi Amerika Serikat juga terlibat dalam mendukung gerakan ini, menjadikannya sebagai bagian dari kelompok kepentingan, khususnya di kubu oposisi terhadap Donald Trump, yaitu Partai Demokrat AS. Partisipasi dan dukungan dari politisi AS dalam gerakan Women's March menunjukkan bahwa gerakan ini telah menjadi sebuah platform dan memperngaruhi politisi untuk mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mereka yang memiliki pengaruh dalam ranah politik. Hal ini mencerminkan bahwa isu-isu yang diangkat oleh gerakan Women's March mendapat respon luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Gerakan Women's March (WM) di Amerika Serikat berdampak besar terhadap perekatifikasian isu-isu krusial dalam kebijakan publik. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan kesadaran publik terkait dengan isu-isu kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan beragam isu sosial lainnya. Melibatkan jutaan orang dalam protes dan demonstrasi, gerakan ini berhasil mencuri perhatian masyarakat terhadap tuntutan dan aspirasinya. Selain itu, pengaruh politik Women's March terlihat sangat kuat, terutama dalam konteks sikap oposisi terhadap pemerintahan Donald Trump. Partisipasi aktif politisi dan aktivis dalam gerakan ini memberikan suara yang tegas dalam arena politik dan legislasi, menciptakan momentum untuk membahas dan mengatasi isu-isu yang diperjuangkan oleh gerakan tersebut. Gerakan ini, dengan demikian, menjadi agen perubahan yang berperan dalam membentuk agenda politik dan memengaruhi kebijakan publik di Amerika Serikat (Meivio Bahari et al., 2022)

Momentum signifikan bagi Women's March terjadi pada kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris dalam pemilihan presiden tahun 2020. Gerakan ini melihat bahwa kampanye yang diusung oleh Biden sejalan dengan tujuan mereka, termasuk penghapusan diskriminasi gender dan rasial, isu kemanusiaan, upaya pemberantasan rasisme, perhatian terhadap hak anak-anak, dan hak-hak kaum kulit hitam. Women's March menciptakan tekanan yang dapat memotivasi para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengatasi ketidaksetaraan dan isu-isu hak asasi perempuan. Di mana WM mendesak

pemerintah AS untuk mengeluarkan kebijakannya guna mengatasi pelecehan seksual di ranah pendidikan dan pekerjaan.

Pengaruh Women's March, yang juga aktif di Indonesia, terhadap kebijakan publik dapat diamati melalui mobilisasi yang terjadi setiap tahun di seluruh dunia, seringkali pada bulan Maret. Kehadiran mereka membantu memperluas legitimasi dan mengumpulkan informasi seputar target kebijakan tertentu. Women's March memiliki potensi untuk memberikan tekanan pada opini publik, menarik perhatian media, dan mendorong pemerintah untuk mengatasi isu-isu tertentu. Gerakan ini dapat memengaruhi kesadaran masyarakat, membentuk pendekatan media terhadap isu-isu perempuan, dan menciptakan ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang peran perempuan di Indonesia. Pengaruhnya dapat tercermin dalam perubahan sikap masyarakat, cara media meliput isu-isu tertentu, dan potensi pengaruh pada beberapa kebijakan pemerintah. Gerakan Women's March di Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan suara bersama dari masyarakat yang secara tidak langsung dapat memengaruhi peningkatan kesadaran kolektif mengenai isu-isu perempuan dan mendorong perubahan dalam kebijakan publik yang mendukung nilai-nilai dan hak asasi perempuan. Tuntutan utama mereka termasuk mendesak pengesahan undang-undang yang diperlukan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, marginalisasi, hak pekerja migran, dan diskriminasi.

Dalam mencapai penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, Women's March Indonesia (WMI) ikut ambil bagian dalam menyerukan kepada pemerintah agar melindungi lingkungan hidup dan hak-hak pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja perempuan. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga terlibat dalam inisiatif ini. Perkembangan dampak dari protes Women's March (WM) di Indonesia kemudian berfungsi sebagai kelompok kepentingan yang menggunakan dukungan suara publik untuk mendorong pemerintah agar segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Women's March (WM) memperoleh dukungan yang luas dari berbagai lapisan masyarakat, tokoh selebriti, liputan media, dan lembaga pemerintah, termasuk dukungan dari Komnas Perempuan. Perjuangan WM sebagai kelompok kepentingan promosi, yang fokus pada memajukan isu-isu perempuan di Indonesia, telah berhasil menarik perhatian yang signifikan. Saat ini, akun resmi WM Jakarta memiliki lebih dari 15.900 pengikut di Instagram, sementara akun pusat WM mencapai jumlah 1,4 juta pengikut di seluruh dunia.

Hal tersebut menandakan bahwa gerakan ini memiliki pengaruh yang kuat dan merangsang perubahan dalam tatanan sosial dan kebijakan. Keberhasilannya dalam membangun kesadaran kolektif mengenai isu-isu perempuan dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan positif menjadi landasan untuk pertumbuhan lebih lanjut dan penguatan posisinya dalam mendorong perubahan kebijakan di masa depan.

#### **KEBERHASILAN *WOMEN'S MARCH* DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK DI AMERIKA DAN INDONESIA**

Keberhasilan Women's March (WM) dalam memengaruhi kebijakan publik di Amerika Serikat tercermin melalui dampaknya pada kesadaran masyarakat, partisipasi politik, dan transformasi dalam lanskap politik dan kebijakan. Pengaruh WM juga mencakup perubahan dalam representasi politik, khususnya peningkatan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah munculnya gerakan pada tahun 2017. Perubahan ini mencerminkan daya dorong WM terhadap keterlibatan perempuan dalam politik dan pergeseran dalam struktur kekuasaan politik. Sejak kemunculannya pada tahun 2017, Women's March (WM) berhasil meningkatkan andil perwakilan dalam kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Terjadi peningkatan sebesar 84%, dengan sekitar 116 dari 535 anggota terpilih bukan dari kelompok etnis kulit putih pada tahun 2018. Gerakan Women's March

berhasil memengaruhi pemerintah AS dengan mendesak Kantor Hak Sipil Amerika Serikat untuk merumuskan kebijakan terkait pelecehan seksual. Pada 29 Januari 2019, Kantor Hak Sipil AS mengeluarkan kebijakan yang secara komprehensif menjelaskan definisi pelecehan seksual dan menetapkan tanggung jawabnya terkait pelecehan seksual di lingkup pendidikan dan karier. Dukungan dari WM mendorong Kantor Hak Sipil AS untuk merumuskan 89 kebijakan yang melibatkan proteksi dan perluasan terhadap aborsi, pencegahan kematian ibu, perluasan cakupan kontrasepsi dan infertilitas, perawatan kesehatan reproduksi bagi mereka di penjara, rencana keluarga dan pelayanan perawatan penyakit menular seksual, serta peningkatan pendidikan seks. WM juga berkontribusi dalam mempengaruhi kebijakan hak-hak reproduksi, seperti penerapan kesehatan reproduksi pada tahun 2020 di tengah pandemi (Al Ayubi & Zahidi, 2022).

Di Indonesia, Women's March telah mencapai keberhasilan dalam pengaruhnya terhadap kebijakan yang mempengaruhi isu-isu perempuan. Respon terhadap gerakan Women's March di Indonesia mencakup penyelenggaraan sister marches yang sejalan dengan gerakan serupa di Amerika Serikat. Serangkaian aksi serupa ini terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Bandung, Yogyakarta, Palu, dan wilayah lainnya. Meskipun Women's March di Jakarta menjadi pusat, tuntutan yang disusun tidak bersifat sentralistik terhadap Jakarta. Penggunaan momen aksi Women's March di Washington dieksploitasi secara efektif oleh kaum feminis di Indonesia. Mereka berhasil mengumpulkan dukungan dan menyelenggarakan demonstrasi sebagai wujud tindakan solidaritas antara perempuan di seluruh dunia. Kegiatan ini dijadikan sebagai platform untuk menyuarakan tuntutan, memperkenalkan pandangan dan sikap, bahkan mengenalkan ideologi mereka agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.

Sebaliknya, tuntutan tersebut melibatkan beragam kebutuhan dan urgensi yang dinyatakan oleh kelompok atau masyarakat sipil di berbagai wilayah. Women's March di Indonesia berhasil mendorong DPR RI, yang akhirnya melalui sidang paripurna, menghasilkan kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2017. Selain itu, Women's March di Indonesia berupaya untuk memperjuangkan pengesahan RUU PKS, mendapatkan respons yang luas dari hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia terkait RUU PKS tersebut yang pada akhirnya DPR RI menyetujui dari RUU TPKS menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 yang mana sebelumnya pernah diperjuangkan oleh Women's March semenjak tahun 2018. Women's March (WM) juga melakukan tekanan terhadap perlindungan perempuan dalam konteks hukum, menginginkan adanya panduan yang jelas untuk proses hukum terutama dalam kasus kekerasan seksual. Desakan tersebut bertujuan agar persidangan dapat berlangsung tanpa menyalahkan atau merugikan korban. Sebagai hasilnya, Mahkamah Agung mengesahkan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini mengatur prinsip kesetaraan gender dalam persidangan, termasuk panduan perilaku yang harus diikuti oleh Hakim agar sidang tidak memberikan dampak negatif atau merugikan korban (Al Ayubi & Zahidi, 2022).

Jika dilihat perbandingan antara Gerakan Women's March antara AS dan Indonesia yaitu Women's March (WM) di Amerika Serikat dan Indonesia menunjukkan perbedaan dalam dampak dan pencapaian mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Di Amerika Serikat, Women's March berhasil membawa perubahan dalam representasi politik dengan meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih dalam Dewan Perwakilan Rakyat setelah gerakan pada tahun 2017. Gerakan ini juga sukses memengaruhi Kantor Hak Sipil Amerika Serikat untuk merumuskan kebijakan

terkait pelecehan seksual pada tahun 2019, yang secara komprehensif menjelaskan definisi pelecehan seksual dan menetapkan tanggung jawabnya.

Sementara itu, Women's March di Indonesia merespons gerakan serupa di Amerika Serikat dengan menyelenggarakan sister marches dan menciptakan solidaritas antara perempuan di berbagai negara. Keberhasilan Women's March di Indonesia terlihat dalam dampaknya terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran, yang melibatkan penyusunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Gerakan ini juga terlibat dalam perjuangan untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di tingkat nasional, yang pada akhirnya disetujui oleh DPR RI pada tahun 2022. Selain itu, Women's March di Indonesia memainkan peran penting dalam pengesahan PERMA No. 3 tahun 2017 oleh Mahkamah Agung, yang mengatur pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Kedua gerakan ini berhasil membentuk solidaritas global dan memanfaatkan momen aksi di satu negara untuk mendukung tujuan serupa di negara lain. Keberhasilan mereka tercermin dalam kemampuan untuk mendorong perubahan kebijakan serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu perempuan, meskipun dengan fokus yang berbeda di masing-masing negara. WM di Amerika Serikat lebih fokus pada perubahan politik dan pengaruh pada kebijakan pemerintah federal, termasuk isu hak reproduksi. WM di Indonesia lebih berhasil dalam mendesak kebijakan perlindungan pekerja migran dan terlibat dalam perjuangan RUU PKS di tingkat nasional.

## KESIMPULAN

Women's March (WM) di Amerika Serikat dan Indonesia masing-masing memiliki peran dan dampak yang signifikan dalam memengaruhi kebijakan publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu perempuan. Di Amerika Serikat, WM berhasil membawa perubahan dalam representasi politik dengan peningkatan jumlah perempuan yang terpilih dalam Dewan Perwakilan Rakyat. WM berhasil membentuk solidaritas global, memanfaatkan momen aksi di satu negara untuk mendukung tujuan serupa di negara lain. Keberhasilan mereka tercermin dalam kemampuan untuk mendorong perubahan kebijakan serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu perempuan, meskipun dengan fokus yang berbeda di masing-masing negara. Secara keseluruhan, WM di Amerika Serikat lebih fokus pada perubahan politik dan pengaruh pada kebijakan pemerintah federal, termasuk isu hak reproduksi. Di sisi lain, WM di Indonesia lebih berhasil dalam mendesak kebijakan perlindungan pekerja migran dan terlibat dalam perjuangan RUU PKS di tingkat nasional. Keberhasilan keduanya menunjukkan bahwa gerakan sosial dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam membentuk agenda politik dan memengaruhi kebijakan publik demi mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-yubi, M. S. (2022). Perbandingan Pengaruh Women's March terhadap Kebijakan Publik di. *Political* , 13(1), 119-131.
- Bahari, R. A. (2022). Gerakan Women's March Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai Aksi Solidaritas Sesama Perempuan Tahun 2017. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(2), 321-329.
- Claudia, Christine Devi . (2022). Dampak Aksi Women's March Indonesia Sebagai gerakan Transnational Advocacy Network . *Sovereign, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* , 4(2), 376-381.
- Ismail, Zacky . (2020 ). Gerakan Women's March dan Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia ; Reality or Claim . *Jurnal Studi Gender dan Anak* , 2(2). 31-38.

Rifqi, Reino Auzan. (2022). Analisis Fenomena Gerakan Women's March dan Respon Media . *Jurnal Lentera*, 2(1), 100-102.